

Analysis of SMEs Empowerment and Assistance in Laut Dendang Village

Analisis Pemberdayaan Dan Bantuan Umkm Di Desa Laut Dendang

Riki Irawan Polem ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ rikiirawanpolem658@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Polem, R. I., Sudiarti, S. (2022). Analysis of MSME Empowerment and Assistance in Laut Dendang Village. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Septembr2022]

Revised [15 Oktober 2022]

Accepted [23 Oktober 2022]

KEYWORDS

Empowerment;
government assistance;
SMEs

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pilar perekonomian nasional salah satunya ditopang oleh kehadiran UMKM. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dalam proses memberdayakan UMKM menjadi topik yang selalu menarik untuk diulas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang serta bantuan apa saja yang diperoleh pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode analisis triangulasi melalui wawancara dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya keberhasilan pemberdayaan yang dikonseptkan dengan lima indikator. Ketiga indikator yakni bantuan dana, prasarana untuk memperlancar hasil pemasaran dan pelatihan telah terealisasi dengan cukup baik oleh pemerintah. Namun dua indikator lainnya patut menjadi perhatian pemerintah pada aspek sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dikarenakan sarana serta prasarana pendukung kegiatan usaha merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas pelaku usaha. Dan penguatan kelembagaan dapat membuka kesempatan untuk menjembatani para pelaku UMKM dengan berbagai institusi pemerintah lainnya dan pihak swasta untuk memberikan pelatihan dan pengembangan usaha.

ABSTRACT

One of the pillars of the national economy is supported by the presence of MSMEs. So that the efforts made by the government in the process of empowering MSMEs are always interesting topics to be reviewed. The purpose of this study was to investigate and analyze the empowerment of MSMEs in Laut Dendang Village and what assistance was obtained by MSME actors as a form of empowerment carried out by the government. This research uses descriptive qualitative method with triangulation analysis method through interview and observation. The results of the analysis show that the success of empowerment is conceptualized with five indicators. The three indicators, namely financial assistance, infrastructure to facilitate marketing results and training, have been realized quite well by the government. However, two other indicators deserve the government's attention on the aspects of facilities and infrastructure supporting business activities and strengthening community institutions. This is because the facilities and infrastructure that support business activities are one of the important factors that can support the performance and productivity of business actors. And institutional strengthening can open up opportunities to bridge MSME actors with various other government institutions and private parties to provide training and business development.

PENDAHULUAN

Salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu Negara dapat dilihat berdasarkan kondisi perekonomian Negara tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai taraf perekonomian yang lebih tinggi, pertumbuhan perekonomian yang positif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ermawati & Pujiyanto, 2022). Di Indonesia sendiri perekonomian ditopang oleh hadirnya usaha mikro kecil dan menengah yang banyak digeluti oleh masyarakat. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai kemajuan dan perkembangan ekonomi ialah melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM terus dimaksimalkan oleh pemerintah dengan cara memberikan berbagai stimulus dan kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang berdaya saing tinggi (Gemala et al., 2022). Diantara kebijakan pemerintah tersebut ialah memberikan keringanan untuk memperoleh modal usaha pada bank maupun layanan keuangan, penguatan kelembagaan, bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan dan lokakarya, percepatan menuju digitalisasi UMKM dan kebijakan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut ditempuh oleh pemerintah mengingat kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional besar manfaatnya. Terbukti melalui krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998. UMKM menunjukkan ketangguhannya dengan tetap kokoh ditengah guncangan keuangan dan krisis ekonomi kala itu (Putra, 2018).

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik proporsi UMKM menunjukkan dominannya atas usaha yang terdapat di Indonesia dengan proporsi sebesar 99,99 persen. Bahkan dari tahun ke-tahun pertumbuhan UMKM terus mengalami tren kenaikan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 65,47 juta unit yang mengalami kenaikan sebesar 1,98 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 64,19 juta unit usaha. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara aktif dan terstruktur dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dari berbagai aspek. Pertama, dengan berkembangnya UMKM tenaga kerja dapat diserap secara maksimal dan menurunkan angka pengangguran. Hadirnya UMKM menciptakan distribusi pendapatan yang merata dimasyarakat. Dengan pengembangan UMKM yang baik dapat meningkatkan pendapatan usaha yang diterima sehingga kesejahteraannya pelaku usaha turut meningkat pula (Rahayu et al., 2021). Tak hanya itu keberadaan UMKM juga mampu mendorong perekonomian regional. Selain itu, kehadiran UMKM mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi serta kebudayaan masyarakat setempat. Kegiatan usaha UMKM sendiri mencakup hampir semua lini lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi begitu besar bagi peningkatan pendapatan terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021).

Namun dengan berbagai peluang tersebut tidak serta merta membebaskan UMKM dari berbagai kendala, tantangan dan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tidak terlepas dari kendala modal usaha, sumber daya manusia yang kurang berkompeten, kurangnya pemanfaatan teknologi, terbatasnya bahan baku, kendala pemasaran dan lain sebagainya (Setiyawati & Oktafia, 2021). Maka hal ini juga dirasakan oleh para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Para pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya mendapat modal usaha, serta strategi pemasaran yang dirasa kurang maksimal sehingga pendapatan mereka terus mengalami penurunan. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku UMKM. Sehingga nantinya tampak jelas bagaimana pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan identifikasi dan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang patut dibenahi dalam pemberdayaan UMKM untuk kedepannya. Sehingga pilar perekonomian bangsa ini semakin baik kedepannya dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah suatu proses yang dilakukan ataupun upaya dan langkah yang ditempuh seperti pemberian wewenang, memberikan kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi seseorang atau sekelompok orang agar ia memahami apa yang akan dikerjakannya sehingga berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Sopah et al., 2020). Pemberdayaan juga terkait dengan mendapatkan akses ke sumber daya dan kekuatan untuk mencari nafkah dan memfasilitasi perubahan sosial. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat yang terpinggirkan untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik lokal dan nasional. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menciptakan suasana manusia yang lebih efektif, terstruktur, adil dan beradab baik itu dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, daerah, negara dan internasional. Hal yang sama berlaku di bidang-bidang seperti politik dan ekonomi (Alam et al., 2021).

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Mubyarto dalam (Firstyananda et al., 2020) pemberdayaan ialah suatu cara membangun masyarakat, memotivasi dan mendorong mereka serta meningkatkan kesadaran mereka akan potensi yang mereka miliki dan cara mengembangkannya agar mengalami peningkatan. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwasanya pemberdayaan ialah "Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri". Pengembangan UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, sebab perannya yang begitu besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional (Andiny & Nurjannah, 2018).

Selain itu, Mardikanto dan Seobiato mengartikan istilah pemberdayaan sebagai suatu upaya pemberian kekuasaan, yang berarti kemampuan, dan keberanian, yang berarti kedudukan. Siapapun bisa memberdayakan warga, namun dalam banyak kasus pemberdayaan ini terbatas pada pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk mengentaskan atau menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, banyak yang memilih jalur pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka (Ramadhanti et al., 2022). Pemberdayaan berarti, dorongan, bimbingan, dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat agar mandiri. Upaya ini merupakan tahapan yang ditempuh dalam proses pemberdayaan yang dapat mengubah perilaku untuk menuju pada perilaku yang lebih baik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan (Handayani et al., 2021).

Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang ditujukan kepada masyarakat merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Sunyoto Usman (Arifah, 2015) berikut ini:

1. Bantuan dana bagi modal usaha
2. Pengembangan prasarana sebagai pendukung pengembangan aktivitas social ekonomi masyarakat
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi
4. Pelatihan bagi social ekonomi masyarakat
5. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Ermawati & Pujiyanto, 2022). Usaha mikro dan UKM yang umumnya

juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak berbadan hukum, menggunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, dan diakui secara resmi sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. dan sektor ultra-hukum (Harahap, 2018).

Menurut Ade Komarudin konsep usaha kecil memiliki banyak arti. Pertama, usaha yang didirikan ada dasarnya untuk tujuan kegiatan ekonomi bukan kegiatan niralaba. Kedua, usaha yang produktif atau menghasilkan keuntungan atau profit dari usaha. Ketiga, usaha mandiri atau berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian, cabang, atau afiliasi dari usaha lain. Keempat, usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha (Ondang et al., 2019).

Peran UMKM sangat penting, bagi daerah UMKM berperan sebagai sebagai motor penggerak pertumbuhan dan kemajuan Ekonomi lokal. Jika kegiatan UMKM berkembang tampil secara konsisten bisa berperan penting untuk penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Usaha kecil dan menengah memanfaatkan potensi sumber daya alam, sehingga sumber daya manusia desa terdiversifikasi, apabila didukung oleh inovasi dan teknologi maka akan semakin banyak produk lokal yang dihasilkan UMKM yang baik dan berdaya saing internasional (Fitriana & Eprilianto, 2022). UKM selalu digambarkan sebagai sektor dengan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya tidak berpendidikan dan melakukan kegiatan usaha baik di sektor tradisional maupun modern. Pemahaman ini menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha yang berperan sangat besar dalam menopang perekonomian masyarakatnya, namun pengelolanya belum memiliki kompetensi yang diperlukan (Nirwana et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan bentuk penelitian triangulasi kualitatif. Dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, yakni pemilihan sampel dilakukan atau dipilih secara sengaja dengan tujuan tertentu. Lokasi penelitian bertempat di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling (Bhardwaj, 2019) dimana pemilihan sampel dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menemukan inti dan fokus permasalahan yang diangkat. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari dua elemen yaitu pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa dan Kaur kesejahteraan. Sementara itu, pihak lainnya berasal dari masyarakat yakni para pelaku UMKM yang diberdayakan. Berikut ini disajikan informasi mengenai informan penelitian.

Tabel. 1 Informasi Informan

Inisial Informan	Posisi/Jabatan
NI	Sekretaris Desa
KD	Kaur Kesejahteraan
LS	Pelaku UMKM
TL	Pelaku UMKM
YP	Pelaku UMKM

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebuah cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data maka sumber data penelitian diperoleh melalui data primer yang peneliti dapatkan melalui observasi langsung

dilapangan dan menelusuri dokumentasi yang bersumber dari berbagai media, buku maupun literature lainnya dalam menambah informasi terkait dengan topic permasalahan yang diangkat. Selain itu juga peneliti melakukan proses wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan informan penelitian. Beberapa pertanyaan dilontarkan kepada informan penelitian terkait hasil pengamatan. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dinilai memiliki kapabilitas untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian masyarakat pelaku UMKM yang diberdayakan. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka sehingga memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk memperluas jangkauan pertanyaan, dan semi terstruktur yang tidak terlalu terpaku pada struktur pertanyaan wawancara. Selain itu juga studi dokumentasi dikumpulkan melalui publikasi yang bersumber dari berbagai media yang berkaitan dengan objek

Operasionalisasi Variabel

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka fokus pertanyaan didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Sunyoto Usman dalam penelitian (Aliffiana & Widowati, 2018) untuk mengukur keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta kepada masyarakat dengan menggunakan lima indikator pokok, yakni:

1. Bantuan dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan aktivitas ekonomi social masyarakat
3. Penyediaan sarana dalam rangka memperlancar proses pemasaran hasil produksi
4. Pelatihan bagi social ekonomi masyarakat
5. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

Teknik Analisis

Analisis data merupakan suatu langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk memproses data yang telah terkumpul. Teknik analisis data dilakukan dengan metode triangulasi yang merujuk pada model Miles dan Huberman yang memuat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Langkah pertama setelah data diperoleh adalah melakukan reduksi atau dapat dikatakan meringkas, menentukan hal-hal yang utama dan yang dianggap penting, kemudian mencari tema serta pola datanya. Setelah itu melakukan penyajian data yang bertujuan agar sekumpulan informasi yang telah didapat dan disusun secara terstruktur bisa dipahami dengan mudah. Lalu masuk tahap akhir dengan melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah Desa Laut Dendang guna mencapai hasil produksi dan pendapatan yang maksimal. Dengan pemberdayaan yang optimal diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi para pelaku UMKM dan bermanfaat pada peningkatan produktivitas masyarakat setempat. Untuk mencapai target atas pemberdayaan yang dilakukan maka berbagai upaya didorong oleh pemerintah bersama dengan stakeholder terkait. Berikut ini akan dipaparkan lebih terperinci terkait dengan keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan lima indikator pokok yakni sebagai berikut.

Bantuan Dana Sebagai Modal Usaha

Dana ataupun modal usaha ialah faktor produksi yang amat penting keberadaannya bagi sebuah usaha. Modal usaha juga merupakan suatu ukuran apakah usaha yang dilakukan mengalami peningkatan atau justru penurunan. Guna peningkatan serta pengembangan usaha tentu dibutuhkan suntikan dana sebagai modal usaha. Maka dari itu usaha kecil dan menengah

yang banyak digeluti oleh masyarakat ini perlu penguatan dalam hal permodalan. Pemerintah desa sebagai pemerintahan yang paling dekat keberadaannya dengan masyarakat wajib hadir untuk memberikan bantuan atas masalah permodalan yang dihadapi pelaku UMKM.

Berdasarkan pengamatan serta wawancara yang dilakukan UMKM di Desa Laut Dendang dominannya bergerak pada bidang kuliner, namun banyak juga yang menawarkan jasa serta usaha lainnya. Terkait dengan masalah permodalan pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakatnya dengan menjembatani para pelaku UMKM dengan perbankan untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Pemerintah desa mendampingi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana dari perbankan mulai dari proses administrasi hingga pencairan. Walaupun pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan dana secara langsung akan tetapi dengan hadirnya pemerintah desa dalam memberikan solusi permodalan dengan cara pendampingan dirasa cukup membantu. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa maka proses peminjaman modal usaha pada bank dilakukan dengan proses yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan peminjaman langsung yang diajukan oleh pelaku UMKM kepada bank.

Pemerintah juga turut memberikan perhatiannya kepada usaha UMKM yang menjadi pilar perkeonomian nasional ditengah wabah pandemic Covid agar dapat bertahan ditengah krisis yang melanda. Pemerintah memberikan bantuan dana dalam rangka penyelamatan kegiatan usaha UMKM. Stimulus berupa bantuan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk bantuan modal usaha yang ditujukan kepada pelaku UMKM telah disalurkan cukup baik kepada para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyelamatan ditengah wabah.

Pembangunan Prasarana Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha

Sarana serta prasarana juga merupakan faktor yang tak kalah penting bagi pengembangan usaha UMKM. Sepatutnya sarana serta prasarana untuk mendukung pengembangan usaha juga menjadi perhatian pemerintah. Yang mana diketahui bahwasanya hadirnya UMKM merupakan pilar bagi perekonomian bangsa, yang besar kontribusinya bagi Negara. UMKM ialah usaha yang banyak digeluti masyarakat yang mampu bertahan atas guncangan keuangan yang dihadapi Negara. Sehingga hal-hal yang terkait dengan pengembangan usaha sepatutnya perlu didukung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, kehadiran pemerintah dalam menghadirkan sarana dan prasaran pendukung kegiatan usaha kurang dirasakan keberadaannya. Pemerintah belum pernah memberikan sarana atau alat usaha secara langsung yang mampu mendorong pengembangan usaha para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Namun dari segi prasarana pemerintah desa melakukan pembangunan jalan guna kelancaran aksesibilitas masyarakat dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.

Penyediaan Sarana Untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi

Setelah proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku UMKM maka tahap selanjutnya ialah melakukan promosi atau pemasaran hasil usaha. Proses pemasaran ialah hal yang patut digiatkan agar hasil usaha ataupun jasa laku dipasaran sehingga pendapatan yang diperoleh sesuai dengan harapan. Maka untuk memperlancar proses pemasaran banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi serta akses internet yang tersedia. Pemerintah telah menyediakan akses internet keberbagai wilayah hingga ke pelosok negeri guna akselerasi dan digitalisasi ekonomi. Maka para pelaku UMKM dapat mengambil manfaat adanya digitalisasi dengan cara memasarkan produk keberbagai platform e-commerce dan media social yang ada.

Atas dasar wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM salah satu kesulitan dan tantangan terbesar yang dihadapi para pelaku UMKM ialah pemasaran. Para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang mengeluhkan kurangnya keterampilan dalam memasarkan produk yang hendak dijual. Maka atas dasar kendala yang dihadapi pemerintah desa memberikan solusi dengan melakukan pemberdayaan melalui cara memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana tips serta kiat-kiat dalam memasarkan hasil usaha. Dalam memperlancar pemasaran hasil produksi kehadiran pemerintah juga dapat dirasakan melalui penyediaan sarana akses internet yang memadai di Desa Laut Dendang. Karena akses internet merupakan salah satu fasilitas yang dapat mendorong kelancaran pemasaran hasil produksi barang dan jasa para pelaku UMKM.

Dengan akses internet yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, maka para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang dapat menangkap peluang yang ada dengan beralih pada digitalisasi. Pemerintah juga mendorong akselerasi digitalisasi UMKM. Sebagaimana pembelajaran yang didapat dari mewabahnya virus Covid 19 mengharuskan semua pekerjaan terhubung pada dunia digital. Dengan pemanfaatan internet dan dunia digital maka UMKM akan menjadi lebih tangguh dan tahan terhadap guncangan sekalipun.

Pelatihan Bagi Para Pelaku Usaha

Sumber daya manusia merupakan komponen dari faktor produksi yang berperan penting bagi kesuksesan suatu usaha. Pengetahuan dan kemampuan berwirausaha ialah elemen esensial bagi pengembangan usaha para pelaku UMKM. Pelatihan juga berperan dalam meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM. Maka dari itu pelatihan atau workshop sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerja para pelaku UMKM. Dengan sumber daya yang berkualitas maka pengembangan usaha dapat dilakukan secara maksimal. Pelatihan merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memberdayakan para pelaku UMKM guna meningkatkan serta mengembangkan usaha miliknya.

Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Laut Dendang yang ditujukan kepada para pelaku UMKM ialah memberikan pelatihan. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yakni pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Para pelaku UMKM mengeluhkan kendala serta hambatan yang mereka alami dalam memasarkan hasil usahanya. Dengan begitu pemerintah Desa Laut Dendang memberikan solusi dengan cara membuat pelatihan guna meng-upgrade dan meningkatkan skill dan pengetahuan para pelaku UMKM agar pemasaran hasil usaha mereka dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini pemerintah Desa Laut Dendang menghadirkan orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapabilitas dalam hal pemasaran untuk kemudian membagikan ilmunya kepada pemerintah Desa. Lalu selanjutnya pemerintah Desa Laut Dendang membuat pelatihan dan menyampaikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat untuk kemudian diimplementasikan dalam proses pemasaran hasil usahanya.

Penguatan Kelembagaan Kepada Masyarakat

Dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM tentunya diperlukan kerjasama yang baik serta dukungan antar stakeholder terkait. Lembaga masyarakat sangat dibutuhkan perannya untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Lembaga masyarakat yang dapat terkait langsung dengan para pelaku UMKM baik itu koperasi dan sebagainya perlu diperkuat dan didukung keberadaannya untuk mendorong dan menyongsong peningkatan kinerja serta produktivitas pelaku UMKM.

Hadirnya kelembagaan masyarakat pada dasarnya untuk memperkuat serta membantu pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan, sayangnya dalam hal kelembagaan sendiri belum ada kelembagaan yang secara khusus

dapat membantu penguatan dan pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang. Padahal dengan hadirnya kelembagaan masyarakat yang khusus bagi UMKM dapat membuka kesempatan baru bagi sektor pemerintah lainnya maupun swasta yang dapat secara bersama-sama melakukan pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM. Tidak adanya lembaga masyarakat yang dapat membantu penguatan UMKM sehingga masyarakat harus berhadapan langsung kepada pihak pemerintah desa apabila ada kendala atau kesulitan yang dialami. Sementara itu pemerintah desa sendiri sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan lainnya. Maka diharapkan adanya tindak lanjut bagi pemerintah Desa Laut Dendang untuk membentuk lembaga masyarakat yang dapat membantu pemberdayaan serta penguatan UMKM. Dengan hadirnya lembaga tersebut sesama para pelaku UMKM dapat terkoordinir dengan baik, atas masalah kendala serta kesulitan yang dialami pemecahan masalah dapat diatasi secara bersama-sama. Selain itu dengan hadirnya lembaga masyarakat yang dikhususkan bagi UMKM dapat mempermudah menjalin kerja sama dengan institusi pemerintah maupun pihak swasta lainnya dalam memberikan pelatihan, bantuan modal usaha dan sebagainya agar dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan tentunya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan dan bantuan yang diberikan terhadap para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang belum berjalan baik dan belum terealisasi secara maksimal. Pemberdayaan yang diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi masyarakat, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil usaha, pelatihan dan penguatan lembaga. Dari kelima indikator tersebut patut menjadi perhatian pemerintah pada aspek sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dikarenakan sarana serta prasarana pendukung kegiatan usaha merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas pelaku usaha untuk peningkatan dan pengembangan usahanya maka dari itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Selain itu pada aspek penguatan kelembagaan juga jauh dari pengharapan. Belum ada lembaga masyarakat yang secara khusus dapat mengayomi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Padahal penguatan kelembagaan ini dapat membuka kesempatan untuk menjembatani para pelaku UMKM dengan berbagai institusi pemerintah lainnya dan pihak swasta untuk memberikan pelatihan dan pengembangan usaha. Sementara itu pada ketiga indikator lainnya yakni bantuan dana, prasarana untuk memperlancar hasil pemasaran dan pelatihan telah terealisasi dengan cukup baik oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Sholihah, N. M., & Nurrahman, A. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) LAZISMU Magetan dengan Pendekatan Diagram Kartesius Evaluation of the LAZISMU Magetan Empowerment Program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a Cartesian Diagram App. *Al-Muzara'ah*, 9(2), 147-165. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.147-165>
- Aliffiana, D., & Widowati, N. (2018). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 197-211.

Andiny, P., & Nurjannah. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31–37.

Arifah, N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan USAha Batik Tulis Di Kabupaten Kebumen. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 311–320.

Bhardwaj, P. (2019). Types of Sampling in Research. *Journal of the Practice of Cardiovascular Science*, 5(3), 157–163. <https://doi.org/10.4103/jpcs.jpcs>

Ermawati, Y., & Pujiyanto. (2022). Tata Kelola dan Manajemen Keuangan Kelompok UMKM di Desa Wisata. *Snistek*, 4, 385–392.

Firstyananda, E. N., Rahmah, K. P., & Hardjati, S. (2020). Program Kemitraan Upaya Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus : PT . Jasa Marga Surabaya Gempol). *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 45–51.

Fitriana, E. N., & Epriliyanto, D. F. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Dalam Upaya Memajukan UMKM Desa di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 10(4), 1201–1214.

Gemala, I., Amil, & Ramayanto. (2022). Empowerment of Micro , Small and Medium Enterprises (Msmes) To Improve Community Welfare (Case Study on Rengginang Business in Baru Tahan Village , Moyo Utara District , Sumbawa Regency) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 3(1), 16–31.

Handayani, T., Rahmi, M., & Fathoni, M. A. (2021). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Usaha Mikro Terdampak Covid- 19 di Kelurahan Pangkalan Jati Jakarta Selatan. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(2), 1–13.

Harahap, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Perdana Publishing.

Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>

Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>

Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>

Rahayu, S., Sucihati, R. N., Haryadi, W., Aprilia, N., & Putra, F. A. (2021). PENINGKATAN KINERJA PEMASARAN PRODUK UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA MELALUI PEMANFAATAN E-COMMERCE. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 4(1), 239–244.

Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BATIK DI. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 47–52. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.23452>

Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>

Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>